

Upah Minimum dan PDRB Sebagai Determinan Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Kerinci

Adek Irma Rosi^{1*}, Dewi Ernita², Osi Hayuni Putri³

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci, Indonesia

*E-mail: adek.irmarosi1992@gmail.com

Information Article

History Article

Submission: 18-09-2026

Revision: 03-10-2026

Published: 05-10-2026

DOI Article:

10.62421/jibema.v4i2.794

ABSTRAK

Penyerapan tenaga kerja merupakan indikator penting dalam mengukur kemampuan daerah menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menganalisis pengaruh Upah Minimum dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Kerinci periode 2014–2025. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder tahunan dari BPS dan instansi terkait. Analisis dilakukan menggunakan regresi linear berganda dengan transformasi logaritma natural. Hasil menunjukkan bahwa Upah Minimum berkoefisien -0,372 dengan signifikansi 0,266, sehingga tidak berhubungan signifikan secara parsial pada taraf 5 persen. PDRB berkoefisien 0,891 dengan signifikansi 0,073, menunjukkan hubungan positif dan signifikan pada taraf 10 persen, tetapi tidak pada taraf 5 persen. Secara simultan, kedua variabel berhubungan signifikan dengan penyerapan tenaga kerja ($F=17,522$; $\text{sig.}=0,001$). Nilai R^2 sebesar 0,796 menunjukkan bahwa 79,6 persen variasi penyerapan tenaga kerja dapat dijelaskan oleh model. Penggunaan Upah minimum dalam penelitian ini didasarkan pada ketersediaan dan konsistensi data tahunan sebagai indikator kebijakan pengupahan regional, bukan sebagai representasi bahwa seluruh pekerja di Kabupaten Kerinci menerima upah sebesar Upah minimum.

Kata Kunci: Upah Minimum, PDRB, penyerapan tenaga kerja

ABSTRACT

Labor absorption is a crucial indicator for measuring a region's capacity to create employment opportunities and enhance public welfare. This study analyzes the impact of the Minimum Wage and Gross Regional Domestic Product (GRDP) on labor absorption in Kerinci Regency during the 2014–2025 period. A quantitative approach was employed, utilizing annual secondary data from the Central Statistics Agency (BPS) and relevant institutions. Analysis was conducted using multiple linear regression with natural logarithm transformation. The results indicate that the Minimum Wage has a coefficient of -0.372 with a significance level of 0.266; thus, it does not show a significant partial relationship at the 5% level. GRDP has a coefficient of 0.891 with a significance level of 0.073, indicating a positive and significant relationship at the 10% level, though not at the 5% level. Simultaneously, both variables are significantly related to labor absorption ($F=17.522$; $\text{sig.}=0.001$). The R^2 value of 0.796 indicates that 79.6% of the variation in labor absorption can be

Acknowledgment

explained by the model. The use of the Minimum Wage in this study is based on the availability and consistency of annual data as an indicator of regional wage policy, rather than as a representation that all workers in Kerinci Regency earn wages equivalent to the minimum wage.

Key word: Minimum Wage, GRDP, labor absorption

©2026 Published by JIBEMA. Selection and/or peer-review under responsibility of JIBEMA

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi pada dasarnya tidak hanya diarahkan pada peningkatan output dan pendapatan suatu wilayah, tetapi juga pada kemampuan perekonomian dalam menciptakan kesempatan kerja yang produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyerapan tenaga kerja menjadi salah satu indikator penting karena menunjukkan sejauh mana aktivitas ekonomi mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui penciptaan lapangan pekerjaan. Pembangunan ekonomi tidak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi (Hidayat & Perwithosuci, 2024). Menurut (Zasriati et al., 2025) Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang melibatkan serangkaian kebijakan dan strategi pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pemerataan pendapatan, serta mendorong peningkatan kualitas hidup secara berkelanjutan. Peningkatan aktivitas produksi secara teoritis dapat meningkatkan permintaan terhadap faktor produksi, termasuk tenaga kerja. Namun demikian, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja tidak selalu bersifat proporsional karena dipengaruhi oleh struktur ekonomi, tingkat produktivitas, perkembangan teknologi, serta karakteristik sektor-sektor yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, kebijakan upah minimum juga menjadi instrumen penting dalam pasar tenaga kerja karena berkaitan dengan perlindungan pendapatan pekerja sekaligus biaya tenaga kerja yang harus ditanggung oleh dunia usaha.

Pada tingkat regional, persoalan tersebut menjadi semakin penting karena setiap daerah memiliki struktur perekonomian dan karakteristik pasar kerja yang berbeda. Provinsi Jambi, misalnya, memiliki struktur ekonomi yang masih kuat pada sektor berbasis sumber daya alam, khususnya pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kondisi tersebut menyebabkan kemampuan pertumbuhan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja sangat bergantung pada karakteristik sektor yang berkembang. Pada tahun 2024, perekonomian Provinsi Jambi tumbuh sebesar 4,41 persen, sedangkan Kabupaten Kerinci mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,57 persen. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Kerinci sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada tahun yang sama. Namun, perbedaan tingkat pertumbuhan tersebut belum secara otomatis menunjukkan seberapa besar kemampuan perekonomian daerah dalam meningkatkan jumlah penduduk

yang bekerja. Kondisi ini memperlihatkan pentingnya mengkaji keterkaitan antara perkembangan output daerah dan penyerapan tenaga kerja secara lebih spesifik pada tingkat kabupaten. .

Kabupaten Kerinci memiliki karakteristik perekonomian yang cukup khas karena aktivitas ekonominya masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, diikuti oleh perdagangan, konstruksi, serta beberapa sektor jasa. Data BPS menunjukkan bahwa PDRB Kabupaten Kerinci atas dasar harga berlaku meningkat dari sekitar Rp13,41 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp14,72 triliun pada tahun 2024. Pada periode yang sama, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kerinci mencapai 4,57 persen, meskipun lebih rendah dibandingkan pertumbuhan sebesar 5,73 persen pada tahun 2023. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Kerinci tetap mengalami ekspansi, tetapi laju pertumbuhan ekonominya mengalami perlambatan. Peningkatan PDRB umumnya diharapkan mampu mendorong penciptaan lapangan kerja melalui ekspansi kegiatan produksi dan investasi (Y. Rahayu, 2019). Fenomena ini menarik untuk dikaitkan dengan kemampuan daerah dalam menciptakan kesempatan kerja, karena peningkatan nilai PDRB belum tentu sepenuhnya berasal dari aktivitas ekonomi yang bersifat padat karya. Dengan demikian, pertanyaan yang relevan adalah apakah peningkatan aktivitas ekonomi Kabupaten Kerinci selama periode penelitian benar-benar diikuti oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja. Aktivitas ekonomi daerah yang tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), kualitas sumber daya manusia, tingkat pendidikan, dinamika kependudukan, serta kebijakan pengupahan memiliki peran yang saling berkaitan dalam membentuk kemampuan suatu daerah menyerap tenaga kerja (Ganie, 2017) dalam (Saragi, 2024). Menurut (Setiawan, 2025), Daerah dengan PDRB yang lebih tinggi umumnya memiliki aktivitas produksi yang lebih luas dan intensif sehingga berpotensi menciptakan kesempatan kerja yang lebih besar. Namun, peningkatan output ekonomi tidak selalu meningkatkan penyerapan tenaga kerja, terutama apabila pertumbuhan ekonomi lebih didominasi oleh kegiatan produksi yang bersifat padat modal. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara PDRB dan penyerapan tenaga kerja bersifat dinamis dan perlu dikaji lebih lanjut dalam konteks regional (Y. Rahayu, 2019). Penyusunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah merupakan salah satu upaya daerah tersebut dalam memberikan informasi yang valid tentang gambaran pembangunan ekonomi, situasi, potensi dan kondisi suatu daerah sehingga memudahkan pemerintah maupun pihak swasta dalam menentukan pembangunan di daerah tersebut (Rosi, 2023).

Dari sisi ketenagakerjaan, Kabupaten Kerinci memiliki basis angkatan kerja yang relatif besar. Berdasarkan data Sakernas Agustus 2024 yang disajikan BPS, jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten Kerinci mencapai 197.329 orang, dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 153.214 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 149.363 orang merupakan penduduk yang bekerja, sedangkan 3.851 orang merupakan pengangguran terbuka. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Kerinci tercatat sebesar 77,64 persen. Angka tersebut menunjukkan tingginya keterlibatan penduduk usia kerja dalam aktivitas ekonomi. Namun, tingginya partisipasi angkatan kerja perlu diikuti dengan kemampuan perekonomian daerah dalam menyediakan pekerjaan yang memadai. Dengan kata lain,

peningkatan PDRB harus dilihat tidak hanya dari besarnya nilai produksi, tetapi juga dari kemampuan pertumbuhan tersebut dalam menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Tenaga kerja dengan kualitas yang lebih tinggi umumnya memiliki produktivitas yang lebih baik dan lebih mudah diserap oleh sektor-sektor ekonomi modern (Sianipar, 2023)

Penyerapan tenaga kerja adalah keterampilan angkatan kerja untuk menerima tenaga kerja yang memenuhi kriteria pasar tenaga kerja (Prima, 2026). Penyerapan tenaga kerja merupakan masalah penting dalam pembangunan daerah. Tenaga kerja dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan suatu daerah, artinya penyerapan tenaga kerja mendukung keberhasilan pembangunan daerah secara keseluruhan. Sehingga kondisi ketenagakerjaan dapat juga menggambarkan kondisi perekonomian, sosial, bahkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu (silvia Rahayu, 2024)

Selain PDRB, faktor upah merupakan variabel penting dalam menjelaskan dinamika penyerapan tenaga kerja. Kabupaten Kerinci belum menetapkan besaran UMK tersendiri sehingga upah minimum yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi. Penggunaan UMP Jambi dilakukan karena penelitian menggunakan data tahunan periode 2014–2025 dan UMP merupakan seri data upah minimum yang tersedia secara konsisten untuk wilayah Provinsi Jambi. BPS Provinsi Jambi menyediakan seri statistik UMP Jambi, sedangkan data pemerintah daerah juga mencatat UMP Jambi sebagai indikator biaya tenaga kerja. Secara empiris, upah minimum menunjukkan kecenderungan meningkat dalam jangka panjang. Upah minimum tercatat sebesar Rp1.502.250 pada 2014, meningkat menjadi Rp2.630.162 pada 2020, Rp2.698.940 pada 2022, Rp2.943.033 pada 2023, Rp3.037.122 pada 2024, dan mencapai Rp3.234.535 per bulan pada 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perubahan standar minimum remunerasi pekerja yang perlu dianalisis bersama dengan perkembangan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Kerinci.

Kenaikan upah minimum secara teoritis dapat menghasilkan dua mekanisme yang berbeda terhadap penyerapan tenaga kerja. Dari perspektif pekerja, peningkatan upah dapat meningkatkan pendapatan, daya beli, motivasi, dan kesejahteraan sehingga berpotensi memperkuat aktivitas ekonomi melalui peningkatan konsumsi rumah tangga. Namun, dari perspektif perusahaan, peningkatan upah merupakan bagian dari biaya produksi sehingga dapat mendorong perusahaan melakukan penyesuaian penggunaan tenaga kerja, terutama apabila kenaikan upah tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas. Oleh karena itu, pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja secara empiris tidak selalu menghasilkan arah yang sama antarwilayah. Menurut (Lube et al., 2021) Kebijakan upah minimum turut memengaruhi keputusan perusahaan dalam menyerap tenaga kerja. Penetapan upah minimum diharapkan mampu melindungi kesejahteraan pekerja, namun pada tingkat tertentu dapat meningkatkan biaya produksi dan berpotensi menekan permintaan tenaga kerja. Oleh karena itu, pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja masih menjadi perdebatan dan menunjukkan hasil yang beragam dalam berbagai penelitian empiris. Fenomena tersebut menjadi semakin relevan bagi Kabupaten Kerinci karena

struktur ekonomi daerah masih memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap sektor pertanian dan kegiatan ekonomi lainnya yang memiliki karakteristik penggunaan tenaga kerja berbeda. Dengan demikian, peningkatan UMP Jambi perlu dianalisis bersama dengan perkembangan PDRB untuk mengetahui apakah perubahan standar upah tersebut berkorelasi dengan perubahan kemampuan ekonomi daerah dalam menyerap tenaga kerja.

Perkembangan terbaru juga memperlihatkan bahwa perekonomian Kabupaten Kerinci terus mengalami peningkatan secara nominal. Data terbaru menunjukkan PDRB Kabupaten Kerinci atas dasar harga berlaku pada tahun 2025 mencapai sekitar Rp15,81 triliun, meningkat dari sekitar Rp14,72 triliun pada tahun 2024, sementara pertumbuhan ekonomi tahun 2025 tercatat sekitar 4,61 persen. Struktur PDRB 2025 masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan nilai sekitar Rp8,03 triliun, disusul perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sekitar Rp1,66 triliun serta konstruksi sekitar Rp1,59 triliun. Perkembangan tersebut semakin memperkuat relevansi penelitian mengenai hubungan antara output ekonomi dan pasar tenaga kerja. Peningkatan PDRB yang cukup besar secara nominal perlu dilihat lebih lanjut apakah diikuti oleh peningkatan kapasitas penyerapan tenaga kerja. Terlebih lagi, dominasi sektor pertanian menunjukkan bahwa karakteristik pertumbuhan ekonomi Kerinci memiliki kemungkinan berbeda dengan daerah yang lebih didominasi oleh sektor industri atau jasa modern.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian berjudul “Upah Minimum Dan PDRB Sebagai Determinan Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Kerinci diarahkan untuk menganalisis pengaruh Upah minimum dan PDRB Kabupaten Kerinci terhadap penyerapan tenaga kerja, baik secara parsial maupun simultan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan dan pembangunan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan output, tetapi juga pada perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menguji secara empiris hubungan antara Upah Minimum dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kerinci terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Kerinci. Kabupaten Kerinci menggunakan standar Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi karena belum menetapkan besaran UMK tersendiri. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dengan periode pengamatan tahun 2014–2025. Periode tersebut menghasilkan 12 observasi tahunan. Pemilihan periode penelitian dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai dinamika upah minimum, perkem-

banagan aktivitas ekonomi daerah, dan perubahan penyerapan tenaga kerja dalam rentang waktu yang cukup panjang.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi dengan memanfaatkan data statistik yang bersumber dari laporan dan publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi dan Kabupaten Kerinci. Data yang dikumpulkan mencakup informasi mengenai upah minimum, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan penyerapan tenaga kerja. Selanjutnya, studi pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai literatur ilmiah, landasan teori, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan variabel dan permasalahan yang dikaji. Teknik analisis ini yang digunakan yaitu regresi linear berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh upah minimum dan PDRB terhadap Kesempatan Kerja di Kabupaten Kerinci..

Tabel 1. Persamaan Regresi

Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients		t	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	9,436	,973			9,702	,000
Log_X1	-,372	,313	-,1213		-1,187	,266
Log_X2	,891	,439	,2,073		2,030	,073

a. Dependent Variable: Log_Y

Sumber: data diolah (2026)

Dalam analisis regresi linear berganda ini, variabel dependen adalah Penyerapan Tenaga Kerja dan variabel independennya adalah Upah Minimum dan PDRB. Regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas untuk mengukur pengaruhnya terhadap variabel terikat. Berdasarkan koefisien regresi yang diberikan, persamaan regresi linear bergandanya dapat ditulis sebagai: $Y = 9,436 - 0,372X_1 + 0,891X_2$

Nilai konstanta sebesar 9,436 menunjukkan bahwa apabila upah minimum dan PDRB dianggap konstan, maka nilai logaritma penyerapan tenaga kerja sebesar 9,436.

Koefisien regresi upah minimum sebesar -0,372 menunjukkan bahwa setiap peningkatan pendapatan upah minimum sebesar 1% akan menurunkan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,372%, dengan asumsi variabel lain tetap.

Koefisien regresi PDRB sebesar 0,891 menunjukkan bahwa setiap perubahan PDRB sebesar 1% akan mengubah Penyerapan tenaga kerja sebesar 0,891%, dengan asumsi variabel lain konstan.

Koefisien Determinan

Untuk mengetahui besarnya pengaruh Upah minimum dan PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Kerinci secara simultan dengan menggunakan teknik analisis statistik yang sudah ditentukan semula, maka dapat dijelaskan pada table dibawah ini :

Tabel 2. Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,892 ^a	,796	,750	,03658

a. Predictors: (Constant), Log_X2, Log_X1

Sumber: data diolah (2026)

Hasil analisis menunjukkan nilai R Square sebesar 0,796, sedangkan Adjusted R Square sebesar 0,750. Artinya, sekitar 79,6% variasi penyerapan tenaga kerja dalam model dapat dijelaskan secara bersama-sama oleh perubahan Upah minimum dan PDRB Kabupaten Kerinci. Sementara itu, setelah mempertimbangkan jumlah variabel independen dan ukuran sampel, kemampuan penjelasan model berdasarkan Adjusted R Square mencapai 75,0%. Sisanya sebesar 25,0% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Uji Simultan

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah upah minimum dan PDRB secara bersama-sama berpengaruh terhadap Penyerapan tenaga kerja dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. Uji F

ANOVA ^a					
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F
1	Regression	,047	2	,023	17,522
	Residual	,012	9	,001	
	Total	,059	11		

a. Dependent Variable: Log_Y

b. Predictors: (Constant), Log_X2, Log_X1

Sumber: data diolah (2026)

Pengujian simultan digunakan untuk mengetahui apakah upah minimum dan PDRB Kabupaten Kerinci secara bersama-sama mempunyai hubungan yang signifikan dengan penyerapan tenaga kerja. Hasil uji ANOVA menunjukkan nilai F-statistic sebesar 17,522 dengan tingkat signifikansi 0,001. Karena nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%, maka model secara simultan menunjukkan hubungan yang signifikan antara variabel independen dan penyerapan tenaga kerja.

Dengan demikian, perubahan upah minimum dan PDRB Kabupaten Kerinci secara bersama-sama berkaitan secara signifikan dengan variasi penyerapan tenaga kerja Kabupaten Kerinci selama periode pengamatan. Temuan ini mengindikasikan bahwa dinamika pasar tenaga kerja daerah tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan faktor kebijakan pengupahan dan perkembangan aktivitas ekonomi regional yang tercermin melalui PDRB.

Uji Parsial (uji T)

Pengaruh UMP terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel upah minimum menunjukkan nilai sebesar -0,372 dengan nilai t sebesar -1,187 dan tingkat signifikansi 0,266. Karena nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, maka upah minimum tidak menunjukkan hubungan yang signifikan secara statistik terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten Kerinci dalam model penelitian.

Koefisien negatif sebesar -0,372 menunjukkan arah hubungan negatif dalam model. Secara elastisitas, apabila variabel lain dianggap konstan, kenaikan upah minimum sebesar 1% berkaitan dengan perubahan penyerapan tenaga kerja sekitar -0,372%. Namun, karena hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik, angka tersebut tidak dapat diinterpretasikan sebagai bukti bahwa kenaikan UMP menyebabkan penurunan penyerapan tenaga kerja.

Secara kontekstual, temuan tersebut dapat berkaitan dengan karakteristik pasar kerja Kabupaten Kerinci yang memiliki proporsi pekerjaan informal yang relatif besar. Upah minimum merupakan instrumen pengupahan yang terutama relevan dalam hubungan kerja formal, sedangkan sebagian tenaga kerja daerah bekerja pada sektor yang mekanisme pembentukan upahnya tidak sepenuhnya mengikuti mekanisme pengupahan formal. Oleh karena itu, perubahan upah minimum belum tentu secara langsung tercermin dalam perubahan jumlah tenaga kerja yang terserap di seluruh sektor ekonomi Kabupaten Kerinci.

Pengaruh PDRB terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Variabel PDRB memiliki koefisien sebesar 0,891, dengan nilai t sebesar 2,030 dan tingkat signifikansi 0,073. Hasil tersebut menunjukkan bahwa PDRB mempunyai arah hubungan positif dengan penyerapan tenaga kerja, tetapi pada tingkat signifikansi 5% hubungan tersebut belum signifikan secara statistik.

Koefisien sebesar 0,891 dalam model log dapat dibaca sebagai elastisitas. Artinya, dengan asumsi variabel lain konstan, kenaikan PDRB sebesar 1% berkaitan dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja sekitar 0,891%. Akan tetapi, karena nilai signifikansinya sebesar 0,073 masih berada di atas 0,05, hubungan tersebut belum memenuhi kriteria signifikansi pada taraf 5%.

Menariknya, nilai signifikansi 0,073 berada relatif dekat dengan batas 0,05. Apabila penelitian menggunakan taraf signifikansi 10%, maka hubungan PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja dapat dinyatakan signifikan pada taraf 10%.

Secara ekonomi, arah positif PDRB mengindikasikan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi daerah cenderung diikuti peningkatan kemampuan menyerap tenaga kerja. Namun, besarnya respons tenaga kerja terhadap pertumbuhan output dapat dipengaruhi oleh struktur sektoral PDRB. Apabila pertumbuhan terutama berasal dari sektor yang relatif padat modal atau mengalami peningkatan produktivitas, pertumbuhan output dapat berlangsung tanpa peningkatan tenaga kerja yang sebanding.

PEMBAHASAN

Secara keseluruhan, hasil analisis memperlihatkan bahwa Upah minimum dan PDRB secara simultan berhubungan signifikan dengan penyerapan tenaga kerja, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai probabilitas uji F sebesar 0,001. Namun, ketika diuji secara parsial, masing-masing variabel belum menunjukkan signifikansi pada taraf 5%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dinamika penyerapan tenaga kerja Kabupaten Kerinci lebih tepat dipahami sebagai fenomena yang berkaitan dengan kombinasi faktor ekonomi dan kebijakan, bukan hanya perubahan salah satu variabel secara individual.

Temuan koefisien upah minimum yang negatif tetapi tidak signifikan memberikan indikasi bahwa perubahan kebijakan upah minimum belum memperlihatkan hubungan statistik yang kuat dengan jumlah tenaga kerja yang terserap di Kabupaten Kerinci. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan karakteristik struktur ketenagakerjaan daerah, terutama keberadaan sektor informal dan sektor pertanian yang mekanisme pengupahannya berbeda dengan sektor formal. Dengan demikian, upah minimum lebih tepat dipandang sebagai salah satu faktor kelembagaan dalam pasar kerja, sementara perubahan jumlah tenaga kerja juga dipengaruhi oleh kondisi sektoral, produktivitas, investasi, tingkat pendidikan, dan faktor demografis.

Sementara itu, koefisien PDRB yang positif menunjukkan bahwa perkembangan aktivitas ekonomi memiliki arah hubungan yang sejalan dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Hasil ini mendukung argumentasi bahwa ekspansi ekonomi dapat meningkatkan permintaan terhadap tenaga kerja. Namun, signifikansi pada taraf 5% belum tercapai. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kerinci belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi penciptaan kesempatan kerja dalam skala yang proporsional. Dengan kata lain, pertumbuhan output dan penciptaan lapangan kerja perlu dibedakan sebagai dua dimensi pembangunan ekonomi yang saling berkaitan tetapi tidak identik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis mengenai hubungan Upah Minimum dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Kerinci periode 2014–2025, dapat disimpulkan bahwa Upah Minimum menunjukkan hubungan negatif terhadap penyerapan tenaga kerja, dengan koefisien sebesar -0,372. Namun, hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik pada taraf 5 persen ($p\text{-value} = 0,266$). Sementara itu, PDRB menunjukkan hubungan positif dengan penyerapan tenaga kerja, dengan koefisien sebesar 0,891 dan signifikan pada taraf 10 persen ($p\text{-value} = 0,073$), meskipun belum signifikan pada taraf 5 persen. Secara simultan, Upah Minimum dan PDRB memiliki hubungan yang signifikan dengan penyerapan tenaga kerja, ditunjukkan oleh nilai F sebesar 17,522 dengan signifikansi 0,001. Nilai koefisien determinasi sebesar 79,6 persen menunjukkan bahwa variasi penyerapan tenaga kerja dalam model dapat dijelaskan oleh Upah Minimum dan PDRB, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Temuan ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi daerah yang tercermin melalui PDRB memiliki keterkaitan positif dengan penyerapan tenaga kerja, sedangkan perubahan Upah Minimum belum menunjukkan hubungan parsial yang signifikan selama periode penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, R., & Perwithosuci, W. (2024). Analisis Pengaruh PDRB Perkapita, Upah Minimum, Penyerapan Tenaga Kerja, Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Propinsi Jawa Barat Tahun 2017-2020. *Analysis of the Influence of Per Capita GRDP, Minimum Wages, Labor Absorption, Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 24(1), 89–101. <https://doi.org/DOI: 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.18551>
- Lube, F., Kalangi, J. B., Tolosang, K. D., Pembangunan, J. E., Ekonomi, F., & Ratulangi, U. S. (2021). Analisis Pengaruh Upah Minimum dan PDRB Terhadap penyerapan Tenaga Kerja di Kota Bitung. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(03), 25–36.
- Prima. (2026). Pengaruh Investasi, Tingkat Upah Minimum, dan PDRB Terhadap Penyerapan tenaga Kerja di Pulau Sulawesi. *Ikraith-Ekonomika*, 9(1). <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.37817/ikraith-ekonomika.v9i1>
- Rahayu, Silvia. (2024). Sektor Basis dan Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Sungai Penuh. *Jurnal EMT KITA*, 8(1), 56–63. <https://doi.org/10.35870/emt.v8i1.1842>
- Rahayu, Y. (2019). Pengaruh Upah Minimum Provinsi dan PDRB terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jambi. *Jurnal Development*, 7(2), 174–188.
- Rosi, A. I. (2023). Analisis Potensi Daerah Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto Menggunakan Metode Lokasi Quotient (Lq) Dan Tipologi Klasen Di Kota Sungai Penuh. *Jurnal Administrasi Nusantara (JAN)*, 6(2), 89. <http://www.nber.org/papers/w16019>
- Saragi. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia. *Jurnal*

Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, 3(2), 1224–1233.

Setiawan, R. (2025). Determinan penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia. *Jurnal Ekonomika*, 16(3), 629–643.

Sianipar, J. (2023). Kinerja Industri Manufaktur pada Masa Pandemi Covid-19. *Parahyangan Economic Development Review*, 2(1), 16–28.

Zasriati, M., Putri, O. H., & Harahap, E. F. (2025). Analysis of Faktor Influencing Employment Opportunities in Jambi Province 2014-2023. *TOFE'DU: The Future of Education Journal*, 4(6), 2328–2332.